



TPST PIYUNGAN SEMAKIN 'OVERLOAD' Proses Skema KPBU Perlu Dipercepat

YOGYA (KR) - Proses Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang saat ini sedang bergulir harus dipercepat. Dengan teknologi yang mutakhir bukan insinerator atau pembakaran sampah, karena memang tidak ramah lingkungan.

"Saya tidak menolak KPBU TPST Piyungan, tetapi prosesnya harus cepat. Perlu diketahui, keberhasilan skema KPBU memang membutuhkan waktu yang cukup lama," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Budi Wibowo di Yogyakarta, Sabtu (22/2).

Budi memandang kondisi TPST Piyungan sudah darurat karena 650 ton per hari sampah masuk kesana dan jumlahnya tidak main-main banyaknya. Sehingga apapun yang dibangun di TPST Piyungan maka akan tetap terjadi *overload* sampah disana. "Sudah ada enam investor yang presentasi kepada Pemda DIY. Mereka seharusnya diajak bicara dan dinilai. Jika ragu-ragu, bisa dibuat tim penilai investor yang teknologinya

tepat untuk itu dan singkat karena ada pengerjaan dari hulu ke hilir," tandasnya.

Mantan Asesda Perencanaan dan Pembangunan Selda DIY itu menekankan, pembenahan sampah dari hulu harus dibenahi sehingga permasalahan bisa diatasi. Jika bisa diatasi dari hulu dan beroperasional maka tidak akan terjadi arus transportasi atau distribusi sampah ke TPST Piyungan. "Pemda DIY harus segera menyelesaikan TPST Piyungan dengan mempercepat proses KPBU itu. Sudah proses memang tetapi harus dipercepat, sehingga investor yang sudah ada harus dinilai," tegas Budi Wibowo.

Menurutnya, dengan proses percepatan skema KPBU TPST Piyungan guna mencegah terjadinya darurat sampah karena pasti

akan *overload* sampah. Pemda DIY sudah mengalokasikan Rp 14 miliar untuk membangun infrastrukturnya seperti dermaga dan peninggian talut tetapi tetap akan melebihi kapasitas lagi karena sampah yang ada di hulu tidak bisa dikendalikan dan diangkut ke TPST Piyungan. "Titik beratnya teknologi penanganan sampah dari hulu yang harus ramah lingkungan serta baik apabila diterapkan di DIY. Bahkan ada teori pengelolaan sampah dengan di godok terlebih dahulu," imbuh Budi.

Ditambahkan, teknologi yang diharapkan DIY untuk pengelolaan sampah sebenarnya ramah lingkungan. Adapun untuk skema penanganan sampah yang sudah ada dilanjutkan, sehingga hulu harus dikerjakan hilir serta ramah lingkungan. "Kabupaten Sleman dan Bantul serta Kota Yogyakarta seharusnya bisa berkoordinasi agar darurat sampah di DIY tidak semakin menjadi-jadi dan berkelanjutan. Ini harus dipahami semua pihak karena kondisi sudah darurat sampah maka KPBU tetap

harus diebut," ungkap Budi Wibowo.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Sutarto MP menyatakan pihaknya dengan dukungan sejumlah pihak sudah menyiapkan beberapa skenario untuk memperpanjang umur TPST Piyungan yang kondisinya semakin penuh. Salah satu caranya dengan membuat semacam terasering. Dengan model terasering tersebut, diharapkan sampah akan terkonsentrasi di satu titik sehingga bisa membuka ruang-ruang kosong yang tersisa. "Dengan model (sistem) terasering diharapkan penataan sampah bisa lebih baik, sehingga umur TPST Piyungan bisa diperpanjang," tandasnya.

Menurut Sutarto, selain membuat model terasering, keterbatasan alat berat yang ada di TPST Piyungan diharapkan bisa segera diatasi. Karena adanya keterbatasan alat berat di TPST Piyungan, menjadikan proses bongkar muat dan penataan sampah menjadi kurang maksimal.

(Ira/Ria)-f



Sejumlah armada pengangkut sampah antri di TPST Piyungan Bantul sebelum bongkar muat, Sabtu (22/2) pagi.

Ig. Trihastono, S.Sos, MM

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005